



**Judul** : Keuangan DPR Diusulkan Tak Lagi Masuk ke Dalam Sistem APBN  
**Tanggal** : Jumat, 23 Agustus 2019  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

# Keuangan DPR Diusulkan Tak Lagi Masuk Ke Dalam Sistem APBN

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membiarkan pengelolaan keuangan lembaga legislatif dikelola sendiri. Ini artinya, Kementerian Keuangan tidak perlu lagi mengurus keuangan DPR.

Dalam seminar nasional bertajuk Nota Keuangan APBN 2020: Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara di Gedung DPR/MPR, Fahri menyebut DPR merupakan rekan kerja yang selama ini mengawasi kerja pemerintah.

Karena itu, keuangannya perlu dikelola secara independen.

Menurutnya, pengelolaan keuangan DPR perlu dipisahkan dari keuangan negara agar lembaga legislatif bisa bekerja lebih independen. Pasalnya, tugas dan fungsi para wakil rakyat untuk mengawasi kerja pemerintah.

Dengan begitu, intervensi atau persinggungan kepentingan tidak mudah terjadi antara

DPR dan pemerintah. "Dalam demokrasi, DPR harus punya uang sendiri, tidak bisa dia masuk dalam sistem APBN dan tunduk pada yang mau diperiksa. Ini campur-campur sistem feodal dan demokrasi yang belum tuntas," nilai Fahri.

Sedangkan Sri Mulyani masih enggan memberi tanggapan mengenai usulan Fahri usai seminar nasional tersebut. Bendahara Negara itu memilih segera bertolak ke Komisi XI DPR

untuk rapat pembentukan tim pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai dan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan.

Kenapa Fahri melemparkan usulan tersebut? Apakah selama ini DPR kurang independen karena anggarannya dari APBN? Jika anggarannya dipisahkan dari APBN, bagaimana mekanisme penganggarannya? Bagaimana pula pandangan Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) mengenai usulan ini?